

Analisis Yuridis Penerapan Sanksi Pidana Bagi Aparatur Sipil Negara yang melakukan Pemerasan menurut pasal 368 KUHP (Studi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 939 K/pid/2019 tanggal 29 April 2020)

¹Annisa Dwi Aulia, ²Idris Wasahua, S.Ag., M.H.

¹UNIVERSITAS ESA UNGGUL, JAKARTA

²UNIVERSITAS ESA UNGGUL, JAKARTA

[¹annsdiwaulia@gmail.com](mailto:annsdiwaulia@gmail.com)

ABSTRAK

Pungutan liar termasuk kedalam perbuatan yang melanggar suatu aturan / tindak pidana dan justru banyak terjadi pada system pelayanan publik dalam instansi pemerintahan yang pelakunya merupakan pegawai negeri. Pungutan liar sendiri sebenarnya belum ada pengaturan secara tegas di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Namun pelaku pungutan liar dapat dijerat dengan beberapa pasal dalam KUHP yang salah satu pasalnya adalah pasal 368 KUHP dimana pasal 368 KUHP ini adalah pasal mengenai Pemerasan dengan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan, dimana yang dimaksud dengan kekerasan adalah bilamana suatu perbuatan yang menggunakan tenaga atau kekuatan fisik yang dilakukan terhadap oranglain, sehingga orang itu mengalami kerugian atau cedera akibat perbuatan tersebut, Sedangkan Ancaman Kekerasan adalah bilamana seseorang melakukan ancaman terhadap oranglain yang dapat menimbulkan rasa takut pada orang yang terancam karena ada sesuatu yang akan merugikan dirinya dengan menggunakan kekerasan. Namun menurut hakim unsur kekerasan dan ancaman kekerasan mengalami perubahan norma dan perluasan unsur yang dikaitkan dengan Pasal 81 dan pasal 82 Undang - Undang RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mengenai Kekerasan atau Ancaman Kekerasan dalam Pasal 368 KUHP yang dikaitkan dengan Pasal 81 dan pasal 82 Undang - Undang RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Kata Kunci : Pungutan Liar, Pegawai Negeri, Kekerasan atau Ancaman Kekerasan.

ABSTRACT

Illegal levies are included in acts that violate a rule / criminal act and actually occur in many public service systems in government agencies where the perpetrators are civil servants. Illegal levies themselves actually have no explicit regulation in the Criminal Code (KUHP). However, illegal extortion offenders can be charged with several articles in the Criminal Code, one of which is article 368 of the Criminal Code where article 368 of the Criminal Code is an article regarding Violent Extortion. or Threats of Violence, where what is meant by violence is when an act that uses physical force or strength is committed against another person, so that that person experiences loss or injury due to the act, whereas Violence Threat is when someone makes a threat to another person that can cause fear to people who are threatened because something will harm them by using violence. However, according to the judge, the elements of violence and threats of violence experienced a change in norms and an expansion of the elements associated with Article 81 and Article 82 of the Republic of Indonesia Law No. 35 of 2014 concerning Child Protection. This study aims to find out about Violence or Threats of Violence in Article 368 of the Criminal Code which is linked to Article 81 and Article 82 of the Republic of Indonesia Law No. 35 of 2014 concerning Child Protection.

Keywords: Illegal Levies, Civil Servants, Violence or Threats of Violence.